

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

2020

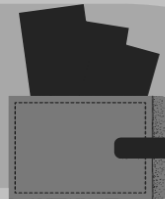


INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN



2020



INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN 2020

ISBN : 978-602-0715-31-5
No Publikasi : 72010.2124
Katalog : 4102002.7201
Ukuran Buku : 18,2 cm x 25,7 cm
Jumlah Halaman : x + 48 halaman

Naskah: :
Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai Kepulauan

Penyunting :
Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai Kepulauan

Gambar Kulit: :
Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai Kepulauan

Diterbitkan oleh: :
© Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai Kepulauan

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

TIM PENYUSUN

Penanggungjawab Umum:

Imron Taufik J. Musa, S.Si, M.Si

Penyunting:

Putri Nurhardiyanti, SST

Penulis:

Putri Nurhardiyanti, SST

Pengolah Data:

Putri Nurhardiyanti, SST

Gambar Kulit:

Putri Nurhardiyanti, SST

<https://bangkepka.iains.go.id>

KATA PENGANTAR

Pembangunan manusia merupakan hal yang sangat penting untuk diukur dan menjadi acuan dalam pembangunan daerah jangka panjang. Banyak indikator yang menjadi alat ukur keberhasilan pembangunan manusia di suatu daerah mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga kondisi ekonomi. Publikasi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Banggai Kepulauan 2020 ini menggambarkan perkembangan pembangunan manusia di Kabupaten Banggai Kepulauan.

Publikasi ini merupakan hasil kegiatan dari penelitian lapangan yang telah dilaksanakan. Sebagaimana diketahui bersama, pemanfaatan data dan informasi untuk perencanaan pembangunan daerah menjadi sangat penting karena inti dari perencanaan adalah bagaimana mengantisipasi masa depan berdasarkan tujuan yang ditetapkan dengan melakukan persiapan yang didasarkan pada data dan informasi yang tersedia saat ini.

Selanjutnya melalui publikasi ini semoga dapat membantu proses penyusunan perencanaan, berguna dan bermanfaat bagi semua pihak dalam memberikan informasi dalam hal perencanaan pembangunan dimasa yang akan datang..

Salakan, Desember 2021
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN



IMRON TAUFIK J. MUSA, S.Si, M.Si

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar	ix
BAB 1 KONSEP PEMBANGUNAN MANUSIA	1
1.1 Konsep Pembangunan Manusia	3
1.2. Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Manusia	6
BAB 2 CAPAIAN PEMBANGUNAN MANUSIA	15
2.1 Posisi Banggai Kepulauan di Sulawesi Tengah	17
2.2 Status Pembangunan Manusia Banggai Kepulauan.....	21
BAB 3 KESENJANGAN PEMBANGUNAN MANUSIA	29
3.1 Kesenjangan Antar Kabupaten/Kota	31
Catatan Teknis	37

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Tengah, 2014-2020	18
Tabel C.1.	Nilai Maksimum dan Minimum Dari Setiap Komponen IPM.....	40
Tabel C.2.	Komoditi Kebutuhan Pokok Sebagai Dasar Perhitungan Daya Beli (PPP).....	45
Tabel C.3.	Klasifikasi IPM	47

<https://bangkepkab.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Tengah, 2014-2020....	18
Gambar 2.2.	Peta IPM Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah, 2020	20
Gambar 2.3.	Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah, 2020.....	21
Gambar 2.4.	IPM Banggai Kepulauan dan Komponen Pembentuk, 2020	22
Gambar 2.5.	Indeks Pembangunan Manusia Banggai Kepulauan, 2014-2020....	23
Gambar 2.6.	Pertumbuhan IPM Banggai Kepulauan, 2014-2020 (Persen).....	23
Gambar 2.7.	Umur Harapan Hidup saat Lahir di Banggai Kepulauan, 2014-2020 (Tahun)	24
Gambar 2.8.	Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah di Banggai Kepulauan, 2014-2020 (Tahun)	25
Gambar 2.9.	Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan di Banggai Kepulauan, 2014-2020 (Juta Rupiah/Tahun)	26
Gambar 3.1.	Selisih IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah, 2014-2020 .	32
Gambar 3.2.	Selisih UHH Tertinggi dan Terendah, 2014-2020 (Tahun).....	33
Gambar 3.3.	Selisih HLS Tertinggi dan Terendah, 2014-2020 (Tahun)	34
Gambar 3.4.	Selisih RLS Tertinggi dan Terendah, 2014-2020 (Tahun)	35
Gambar 3.5.	Selisih Pengeluaran Tertinggi dan Terendah, 2014-2020 (Juta Rupiah/Tahun).....	36
Gambar C.1.	Bagan Pembentukan IPM.....	40

KONSEP PEMBANGUNAN MANUSIA

1

<https://bangkepkab.bpk.go.id>

KONSEP PEMBANGUNAN MANUSIA

1.1. Konsep Pembangunan Manusia

Pembangunan pada hakekatnya merupakan upaya meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, sekaligus merupakan proses pengembangan sistem penyelenggaraan negara terintegrasi untuk semua dimensi kehidupan bermasyarakat guna mewujudkan tujuan nasional. Dalam pengertian lain, pembangunan dapat diartikan merupakan rangkaian upaya perubahan kondisi yang lebih baik, berkesinambungan dan meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk mewujudkan tujuan nasional.

Pelaksanaan pembangunan mencakup beragam aspek kehidupan bangsa, yaitu aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan yang dilakukan secara terencana, terarah, terpadu, bertahap, komprehensif dan berkelanjutan untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang lebih maju. Oleh karena itu, sesungguhnya pembangunan nasional merupakan cerminan kehendak untuk terus menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggara negara yang maju dan demokratis.

Lebih lanjut, hakekat pembangunan adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Kondisi ini mensyaratkan pembangunan memiliki hal-hal sebagai berikut :

1. Perlunya keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan kebulatan yang utuh dalam seluruh tahapan kegiatan pembangunan. Pembangunan adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk pembangunan. Dalam

pembangunan saat ini dan mendatang, unsur manusia, sosial budaya, dan unsur lainnya harus mendapat perhatian yang seimbang.

2. Pembangunan diperuntukkan merata bagi seluruh masyarakat dan di seluruh wilayah tanah air.
3. Subyek dan obyek pembangunan adalah manusia dan masyarakat Indonesia, sehingga pembangunan harus berkepribadian Indonesia dan menghasilkan manusia dan masyarakat maju dan tetap berkepribadian Indonesia pula.
4. Pembangunan dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang mendukung dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Secara spesifik, pembangunan manusia mencakup konsep yang relatif luas. Salah satu pelopor pendekatan pembangunan manusia dalam Ilmu Ekonomi Pembangunan adalah Amartya Sen (1999) yang mengemukakan konsep *human capabilities approach*. Pendekatan ini menekankan pada gagasan kemampuan (*capabilities*) manusia sebagai tema sentral pembangunan. Sebelumnya, Mahbub Ul Haq juga telah menegaskan, manusia harus menjadi inti dari gagasan pembangunan, dan hal ini berarti bahwa semua sumber daya yang diperlukan dalam pembangunan harus dikelola untuk meningkatkan kapabilitas manusia. Gagasan ini sejalan dengan pemikiran *United Nations Development Program* (UNDP) yang diterjemahkan ke dalam beberapa indikator sosial-ekonomi yang menggambarkan kualitas hidup dalam beberapa ukuran kuantitatif, seperti kemampuan untuk hidup lebih panjang dan sehat, kemampuan dalam pengetahuan dan keterampilan serta kemampuan ekonomi (IPM 2015).

Selanjutnya, UNDP mendefinisikan pembangunan manusia (*human development*) sebagai perluasan pilihan bagi setiap orang untuk hidup lebih panjang, lebih sehat dan hidup lebih bermakna. Memperluas pilihan manusia berarti

mengasumsikan suatu kondisi layak hidup yang memungkinkan manusia memperoleh akses untuk mendapatkan pengetahuan dan pendidikan serta akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk hidup secara layak.

Dalam laporan Pembangunan Manusia Tahun 2001, UNDP menyatakan ada empat aspek utama yang harus diperhatikan dalam proses pembangunan manusia, yaitu: *Pertama*, peningkatan produktivitas dan partisipasi penuh dalam lapangan pekerjaan dan perolehan pendapatan. Dalam komponen ini, pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu bagian dari model pembangunan manusia. *Kedua*, peningkatan akses dan kesetaraan memperoleh peluang-peluang ekonomi dan politik. Kondisi ini menuntut penghapusan segala bentuk hambatan ekonomi dan politik yang menghalangi setiap individu untuk berpartisipasi dan memperoleh manfaat dari peluang-peluang tersebut. *Ketiga*, adanya aspek keberlanjutan (*sustainability*), yakni peluang-peluang yang tersedia saat ini dapat dipastikan tersedia juga bagi generasi yang akan datang, khususnya daya dukung lingkungan atau modal alam dan kebebasan manusia untuk berkreasi. *Keempat*, pembangunan tidak hanya untuk masyarakat, tetapi juga oleh masyarakat. Artinya, masyarakat terlibat penuh dalam setiap keputusan dan proses-proses pembangunan, bukan sekedar obyek pembangunan. Dengan kata lain adanya inklusivisme dalam pembangunan.

Dalam kaitannya dengan indikator pembangunan yang diperluas, Bank Dunia telah mengemukakan tiga faktor utama pembangunan, yakni pembangunan manusia, pertumbuhan pendapatan serta kelestarian lingkungan. Indikator pembangunan manusia disebutkan apabila tercapainya lima kondisi, yaitu (1) penurunan kemiskinan; (2) penurunan angka kematian bayi; (3) penurunan ketimpangan pendapatan; (4) peningkatan melek huruf; serta (5) peningkatan Umur Harapan Hidup.

Di antara beberapa pengertian pembangunan manusia di atas, dapat ditarik benang merah kesamaan, bahwa pembangunan manusia adalah upaya meningkatkan kemampuan manusia terutama melalui peningkatan taraf kesehatan dan pendidikan, sehingga membuat manusia menjadi lebih sehat, lebih kreatif dan

lebih produktif sehingga memungkinkan untuk meraih peluang-peluang yang tersedia bagi dirinya masing-masing.

1.2. Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Manusia

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat kinerja perekonomian, baik di tingkat nasional maupun regional (daerah). Pada dasarnya, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan output agregat (keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan perekonomian) atau Produk Domestik Bruto (PDB) dan PDRB di tingkat regional.

Kuznets mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari suatu negara untuk menyediakan berbagai jenis barang dan jasa kepada penduduk. Dengan demikian, manifestasi dari pertumbuhan ekonomi diwujudkan dalam peningkatan output jangka panjang atau secara berkesinambungan (Todaro, 2000).

Berbagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi tersebut oleh Todaro diwujudkan dalam tiga komponen utama. *Pertama*, akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik dan modal manusia atau sumber daya manusia. *Kedua*, pertumbuhan penduduk yang selanjutnya akan menambah jumlah angkatan kerja. *Ketiga*, kemajuan teknologi yang dalam pengertian sederhananya terjadi karena ditemukannya cara-cara baru atau perbaikan atas cara-cara lama dalam menangani suatu pekerjaan (Todaro, 2000).

Selanjutnya, konsep modal manusia ini menjadi penting seiring perkembangan pemikiran bahwa pertumbuhan ekonomi jangka panjang suatu negara tidak hanya didukung oleh kenaikan stok modal fisik dan jumlah tenaga kerja, tetapi juga peningkatan kualitas modal manusia yang memiliki pengaruh kuat terhadap peningkatan kualitas tenaga kerja serta pemanfaatan kemajuan teknologi. Dalam konsep pertumbuhan modern, faktor teknologi dalam arti luas yang dianggap

konstan dan ditentukan secara eksogenus menurut aliran pemikiran pertumbuhan tradisional dianggap kurang tepat. Faktor teknologi adalah dinamis dan ditentukan oleh sumber daya manusia atau mutu modal manusia. Menurut teori pertumbuhan modern, pertumbuhan ekonomi tidak hanya bersumber dari peningkatan jumlah faktor-faktor produksi berupa tenaga kerja (L) dan modal fisik (K) saja, tetapi juga dari produktivitas dari tenaga kerja yang berkaitan erat dengan peningkatan mutu modal manusia.

Teori pertumbuhan ekonomi modern menetapkan bahwa pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang akan ditentukan oleh modal fisik (K), tenaga kerja (L) dan modal manusia (Hc). Sehingga pertumbuhan ekonomi secara sederhana dapat dinotasikan dalam persamaan fungsi sebagai berikut: $Y = F(K, L, Hc, Z)$, dimana K adalah modal fisik; L adalah tenaga kerja; Hc adalah mutu modal manusia; dan Z adalah variabel lain yang berperan dalam pertumbuhan ekonomi, seperti pengeluaran pemerintah untuk meningkatkan mutu modal manusia dalam bentuk belanja pendidikan dan kesehatan.

Penelitian tentang pertumbuhan ekonomi yang dilakukan oleh Barro (1998) melihat pengaruh langsung modal manusia yang diwakili oleh tingkat pendidikan dan pengeluaran pemerintah terhadap PDB serta beberapa variabel lain. Penelitian ini mengambil sampel 100 negara dan menunjukkan pengaruh positif dari variabel pendidikan terhadap laju pertumbuhan PDB per kapita. Dengan demikian, kebijakan yang dapat meningkatkan tingkat pendidikan penduduk akan meningkatkan laju pertumbuhan PDB per kapita.

Pertumbuhan ekonomi meningkatkan persediaan sumber daya yang dibutuhkan pembangunan manusia. Peningkatan sumber daya bersama dengan alokasi sumber daya yang tepat serta distribusi peluang yang semakin luas, khususnya kesempatan kerja akan mendorong pembangunan manusia lebih baik. Hal ini berlaku juga sebaliknya, pembangunan manusia mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi. Tingkat pembangunan manusia yang tinggi sangat menentukan kemampuan penduduk dalam menyerap dan mengelola sumber-

sumber pertumbuhan ekonomi, baik kaitannya dengan teknologi maupun terhadap kelembagaan sebagai sarana penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi (Ramirez, et.al, 1998).

Dengan demikian keterkaitan pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi dapat dipahami dari dua arah, yaitu pengaruh dari pertumbuhan ekonomi terhadap pembangunan manusia dan pengaruh dari pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi. Keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia tidak bisa dianggap linier atau langsung, namun ditentukan oleh sejauh mana peranan faktor-faktor yang menghubungkan kedua konsep tersebut. Di bawah ini akan diuraikan lebih terperinci keterkaitan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia, baik pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pembangunan manusia serta sebaliknya, pengaruh pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi, beserta faktor-faktor yang mengaitkan keduanya.

Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pembangunan manusia dihubungkan dengan atau dipengaruhi oleh dua jalur utama, yaitu jalur aktivitas rumah tangga, mencakup rumah tangga serta berbagai organisasi kemasyarakatan serta jalur belanja dan kebijakan pemerintah.

Aktivitas rumah tangga memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan indikator pembangunan manusia melalui belanja rumah tangga untuk makanan, air bersih, pemeliharaan kesehatan dan sekolah (UNDP, 1996: Ramirez et al, 1998). Kecenderungan aktivitas rumah tangga untuk membelanjakan sejumlah faktor yang langsung berkaitan dengan indikator pembangunan manusia di atas dipengaruhi oleh tingkat dan distribusi pendapatan, tingkat pendidikan serta sejauh mana peran perempuan dalam mengontrol pengeluaran rumah tangga.

Tingkat pendapatan atau PDB per kapita rendah akibat dari pertumbuhan ekonomi yang rendah dapat menyebabkan pengeluaran rumah tangga untuk peningkatan pembangunan manusia menjadi turun. Demikian pula sebaliknya, tingkat pendapatan yang relatif tinggi cenderung meningkatkan belanja rumah

tangga untuk peningkatan pembangunan manusia. Sebagaimana yang banyak dipahami berbagai pengamat ekonomi, bahwa pertumbuhan ekonomi memberikan manfaat langsung terhadap peningkatan pembangunan manusia melalui peningkatan pendapatan. Peningkatan pendapatan akan meningkatkan alokasi belanja rumah tangga untuk makanan yang lebih bergizi dan pendidikan, terutama pada rumah tangga miskin. Dengan kata lain, peningkatan pendapatan memberikan kontribusi secara langsung terhadap peningkatan kapabilitas penduduk.

Di samping ditentukan oleh tingkat pendapatan per kapita penduduk, distribusi pendapatan juga berpengaruh terhadap pengeluaran rumah tangga yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan pembangunan manusia. Pada saat distribusi pendapatan buruk atau terjadi ketimpangan pendapatan menyebabkan banyak rumah tangga mengalami keterbatasan keuangan. Dampaknya kemudian adalah mengurangi pengeluaran untuk pendidikan yang lebih tinggi dan makanan yang mengandung gizi baik (Ramirez et.al, 1998). Pengeluaran lebih banyak ditujukan untuk mengkonsumsi makanan yang tidak mengandung banyak asupan gizi dan nutrisi yang baik (UNDP, 1996). Dengan demikian, jika terjadi perbaikan dalam distribusi pendapatan akan menyebabkan penduduk miskin memperoleh pendapatan yang lebih baik. Peningkatan pendapatan pada penduduk miskin mendorong mereka untuk membelanjakan pengeluaran rumah tangganya agar dapat memperbaiki kualitas kesehatan dan pendidikan bagi anggota keluarga.

Pertumbuhan ekonomi mempengaruhi pembangunan manusia juga ditentukan oleh sejauh mana peranan perempuan dalam alokasi pengeluaran dalam rumah tangga. Perempuan memiliki andil yang besar dalam mengatur pengeluaran rumah tangga yang berkaitan langsung dengan pembangunan manusia. Andil perempuan ini ditentukan oleh tingkat pendidikan perempuan dan bagian pendapatan perempuan dalam rumah tangga. Tingkat pendidikan perempuan terutama terkait dengan pengetahuan perempuan mengenai pemeliharaan kesehatan, gizi dan pendidikan anggota keluarga. Semakin baik atau tinggi tingkat pendidikan perempuan, semakin baik atau tinggi pengetahuan kesehatan yang

dimiliki dan diharapkan dapat diterapkan dalam mengelola rumah tangga. Sementara bagian pendapatan perempuan terkait dengan tambahan pendapatan yang diterima oleh rumah tangga, dan terutama bagi rumah tangga miskin, tambahan pendapatan ini memiliki manfaat yang besar dalam meningkatkan kemampuan belanja rumah tangga untuk kebutuhan kesehatan dan pendidikan. Semakin tinggi kedua faktor ini, maka semakin besar peluang alokasi pengeluaran rumah tangga yang berkaitan langsung dengan pembangunan manusia.

Keterkaitan pertumbuhan ekonomi terhadap pembangunan manusia juga ditentukan oleh sejauh mana efektivitas kebijakan publik dalam mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya, seperti yang diwujudkan dalam alokasi pengeluaran Pemerintah. Ramirez et.al (1998), menyatakan mekanisme alokasi sumber daya dari Pemerintah yang memiliki efek terhadap peningkatan pembangunan manusia dinyatakan dalam tiga bentuk, yaitu (1) rasio pengeluaran Pemerintah terhadap PDB total. Rasio ini menyatakan berapa persen proporsi belanja Pemerintah dari total PDB untuk berbagai pengeluaran; (2) rasio pengeluaran pemerintah untuk peningkatan pembangunan manusia terhadap total pengeluaran pemerintah. Rasio ini menyatakan proporsi pengeluaran Pemerintah untuk peningkatan pembangunan manusia dari total pengeluaran Pemerintah; (3) rasio pengeluaran prioritas yang langsung berkaitan dengan kebutuhan peningkatan pembangunan manusia terhadap total pengeluaran pemerintah untuk peningkatan pembangunan manusia. Rasio ini menyatakan proporsi pengeluaran pemerintah untuk pembangunan manusia pada bidang-bidang prioritas atau yang cenderung memiliki efek lebih besar terhadap peningkatan pembangunan manusia dibandingkan dengan bidang-bidang lainnya (UNDP, 1996).

Selanjutnya, beberapa argumentasi mengenai perlunya mempertimbangkan pengeluaran Pemerintah dalam melihat pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pembangunan manusia, antara lain: *Pertama*, pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pembangunan manusia terutama melalui jalur peningkatan taraf kesehatan dan tingkat pendidikan penduduk. Kedua jalur ini merupakan barang

publik yang memerlukan investasi dari Pemerintah. Investasi untuk barang publik ini merupakan bagian yang berasal dari pengeluaran pemerintah, sehingga besar kecilnya pengeluaran pemerintah untuk kesehatan dan pendidikan turut menentukan capaian indikator pembangunan manusia (Ramirez, 2001).

Kedua, tidak ada jaminan dari mekanisme pasar dalam distribusi pendidikan dan fasilitas kesehatan secara merata bagi penduduk, terutama penduduk miskin atau di daerah perdesaan. Oleh karena itu, diperlukan mobilitas dana dari Pemerintah dalam menyediakan berbagai fasilitas pendidikan dan kesehatan yang dapat dinikmati oleh mayoritas penduduk. Dengan demikian, pengeluaran publik digunakan sebagai instrumen kebijakan pemerataan pendidikan dan kesehatan.

Ketiga, tanpa kebijakan pemerintah secara konkrit, capaian indikator pembangunan manusia sulit diwujudkan. Pengeluaran pemerintah di satu sisi menjadi instrumen mobilitas sumber daya publik sebagai komplemen dari sektor privat dalam menyediakan berbagai fasilitas yang mendorong peningkatan indikator pembangunan manusia (UNDP, 1996; Ramirez et.al, 1998).

Selanjutnya perlu pemahaman bahwa konsep mutu modal manusia sendiri mengacu pada suatu komoditi yang dapat dihasilkan dan diakumulasi, serta biaya untuk menghasilkan suatu mutu modal manusia baru dapat memberikan hasilnya pada masa yang akan datang. Peningkatan kualitas modal manusia dapat tercapai apabila memperhatikan dua faktor penentu yang seringkali disebutkan dalam beberapa literatur, yaitu pendidikan dan kesehatan.

Pendidikan dimaknai dalam arti luas, baik pendidikan dalam arti formal maupun pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas modal manusia, level mikro maupun level makro. Pada level mikro, peningkatan pendidikan seseorang dikaitkan dengan peningkatan pendapatan atau upah yang diperoleh. Apabila upah mencerminkan produktivitas, maka semakin banyak orang yang memiliki tingkat pendidikan tinggi maupun pengalaman pelatihan-pelatihan banyak, semakin tinggi produktivitasnya dan hasilnya ekonomi nasional akan tumbuh lebih tinggi.

Di samping pengaruh terhadap produktivitas, pendidikan juga mempengaruhi kualitas modal manusia melalui kemampuan daya serap terhadap perkembangan metode atau teknologi. Analisis pada beberapa negara berkembang menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dan keterampilan pekerja serta pengusaha berhubungan secara positif terhadap rata-rata perubahan metode dan teknik-teknik yang lebih efektif dan efisien dalam menjalankan perusahaan (Ramirez, et.al, 1998). Pada lapangan usaha pertanian menunjukkan pengaruh positif tingkat pendidikan petani terhadap adopsi teknologi input-input modern, seperti pupuk dan peralatan mekanis, sehingga meningkatkan hasil pertanian. Temuan lainnya adalah petani yang bersekolah lebih lama akan mengadopsi metode bertani lebih baik untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Demikian juga petani yang memiliki pendidikan lebih lama memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan produksi beras (Ramirez, et.al, 1998).

Jika pendidikan menjadi salah satu faktor penentu dalam memacu laju pertumbuhan ekonomi, maka pengeluaran pemerintah untuk pendidikan juga memegang peranan penting. Beberapa temuan empiris menunjukkan bahwa investasi dalam modal manusia, khususnya pendidikan memiliki dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Belanja pemerintah untuk pendidikan memiliki dampak yang kuat dan positif terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Di samping aspek pendidikan, kesehatan juga memiliki peranan penting terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengaruh kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Pengaruh secara tidak langsung faktor kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi umumnya melalui beberapa cara, antara lain perbaikan kesehatan penduduk akan meningkatkan partisipasi angkatan kerja, perbaikan kesehatan dapat pula membawa perbaikan dalam tingkat pendidikan yang kemudian menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi. Pada sisi lain perbaikan taraf kesehatan mendorong pertumbuhan penduduk yang akan berpengaruh terhadap peningkatan jumlah tenaga kerja

Pengaruh kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi seringkali tidak bisa dilepaskan dari peran pendidikan. Jika pendidikan diakui dapat menuntun kepada pemahaman mengenai nutrisi lebih baik, maka pendidikan menjadi variabel penting dalam kebijakan yang membantu meningkatkan taraf kesehatan. Banyak temuan menunjukkan hubungan positif antara tingkat pendidikan orang tua dengan pemenuhan gizi pada anak-anak. Hal ini ditunjukkan misalnya dengan membandingkan antara tingkat melek huruf para ibu yang memiliki pengetahuan gizi baik dengan yang buruk. Hasilnya, tingkat melek huruf yang rendah lebih sering terjadi pada para ibu yang memiliki pengetahuan gizi yang buruk terhadap anak-anaknya. Cara lain menerangkan pengaruh tingkat kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui produktivitas. Tingkat kesehatan yang baik akan mempengaruhi secara positif produktivitas pekerja yang pada akhirnya akan mempengaruhi kesinambungan pertumbuhan ekonomi.

CAPAIAN PEMBANGUNAN MANUSIA

<https://bangkepkab.bps.go.id>

2

CAPAIAN PEMBANGUNAN MANUSIA

2.1. Posisi Banggai Kepulauan di Sulawesi Tengah

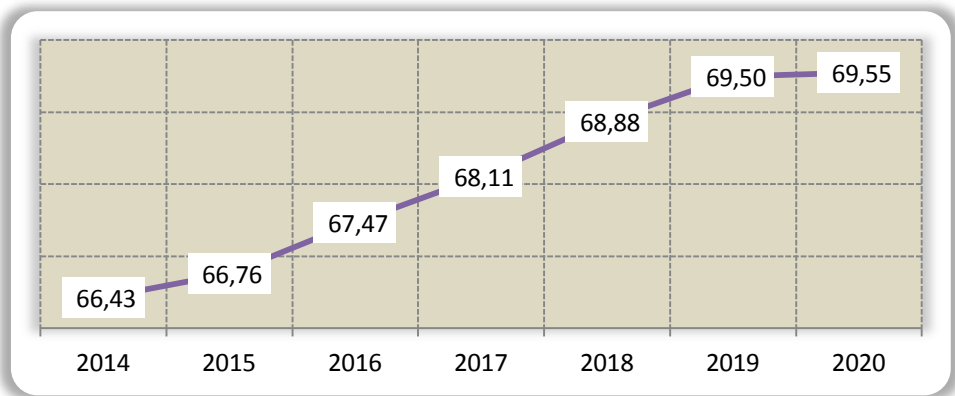
Penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia tidak hanya dilakukan pada level nasional, akan tetapi pada saat yang bersamaan juga menyajikan angka regional baik level provinsi maupun level kabupaten/kota. Dengan adanya IPM di level daerah, dapat dilakukan perbandingan capaian pembangunan IPM antar daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Termasuk juga Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Banggai Kepulauan.

Dari hasil penghitungan IPM selanjutnya dapat dilihat status pembangunan manusia di wilayah tersebut. BPS mengelompokkan status pembangunan manusia berdasarkan IPM menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu:

Sangat Tinggi	$IPM \geq 80$
Tinggi	$70 \leq IPM < 80$
Sedang	$60 \leq IPM < 70$
Rendah	$IPM < 60$

Sejak tiga tahun terakhir, IPM Sulawesi Tengah berada dalam kategori sedang, yaitu 68,88 pada tahun 2018 dan kini menjadi 69,55 pada tahun 2020. Angka IPM Sulawesi Tengah pada tahun 2019 sebesar 69,50, meningkat sebesar 0,05 poin pada tahun 2020. Dapat dikatakan bahwa angka IPM Sulawesi Tengah telah menunjukkan perkembangan yang baik dari tahun ke tahun.

Gambar 2.1. Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Tengah, 2014-2020



Dari sisi angka pertumbuhan, IPM Sulawesi Tengah selama periode 2014-2020 juga selalu menunjukkan angka yang positif. Artinya, secara umum pembangunan manusia di Sulawesi Tengah selalu mengalami perbaikan. Dengan demikian diharapkan kualitas sumber daya manusia di Sulawesi Tengah semakin berkualitas.

Tabel 2.1. Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Tengah, 2014-2020

Tahun	Pertumbuhan (%)
(1)	(2)
2014	0,97
2015	0,50
2016	1,06
2017	0,95
2018	1,13
2019	0,90
2020	0,07

Angka IPM terbentuk dari tiga dimensi, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Adapun setiap dimensi diwakili oleh indikator. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakili oleh indikator Umur Harapan Hidup saat lahir. Untuk dimensi pengetahuan digambarkan melalui angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Selanjutnya, dimensi standar hidup layak diwakili oleh indikator pengeluaran perkapita.

Perkembangan IPM Sulawesi Tengah yang terus membaik tidak lepas dari perkembangan indikator-indikator penyusun pembangunan manusia yang menunjukkan kecenderungan positif dari tahun ke tahun. Umur Harapan Hidup saat lahir di Sulawesi Tengah pada tahun 2020 telah mencapai 68,69 tahun yang berarti bayi yang baru lahir hidup diharapkan dapat bertahan hidup hingga usia 68,69 tahun. Dari tahun ke tahun, Umur Harapan Hidup di Sulawesi Tengah mengalami peningkatan. Umur Harapan Hidup saat lahir ini merupakan indikator yang dapat mencerminkan tingkat kesehatan masyarakat di suatu wilayah baik dari sisi sarana dan prasarana, akses, hingga kualitas kesehatan masyarakat. Dengan meningkatnya Umur Harapan Hidup berarti harapan bayi yang baru lahir untuk hidup semakin panjang karena membaiknya tingkat kesehatan masyarakat.

Sementara itu, indikator rata-rata lama sekolah penduduk Sulawesi Tengah yang berusia 25 tahun ke atas telah mencapai 8,83 tahun atau telah memasuki kelas IX. Selanjutnya, untuk penduduk usia 7 tahun yang mulai bersekolah diharapkan dapat mengenyam pendidikan hingga 13,17 tahun, setara Diploma tingkat I. Kedua indikator ini juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun, pertumbuhan rata-rata lama sekolah cenderung lebih lambat dibandingkan dengan angka harapan lama sekolah.

Indikator berikutnya, pengeluaran penduduk Sulawesi Tengah pada tahun 2020 telah mencapai 9,34 juta per kapita per tahun. Indikator ini mengalami penurunan sebagai dampak dari pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia.

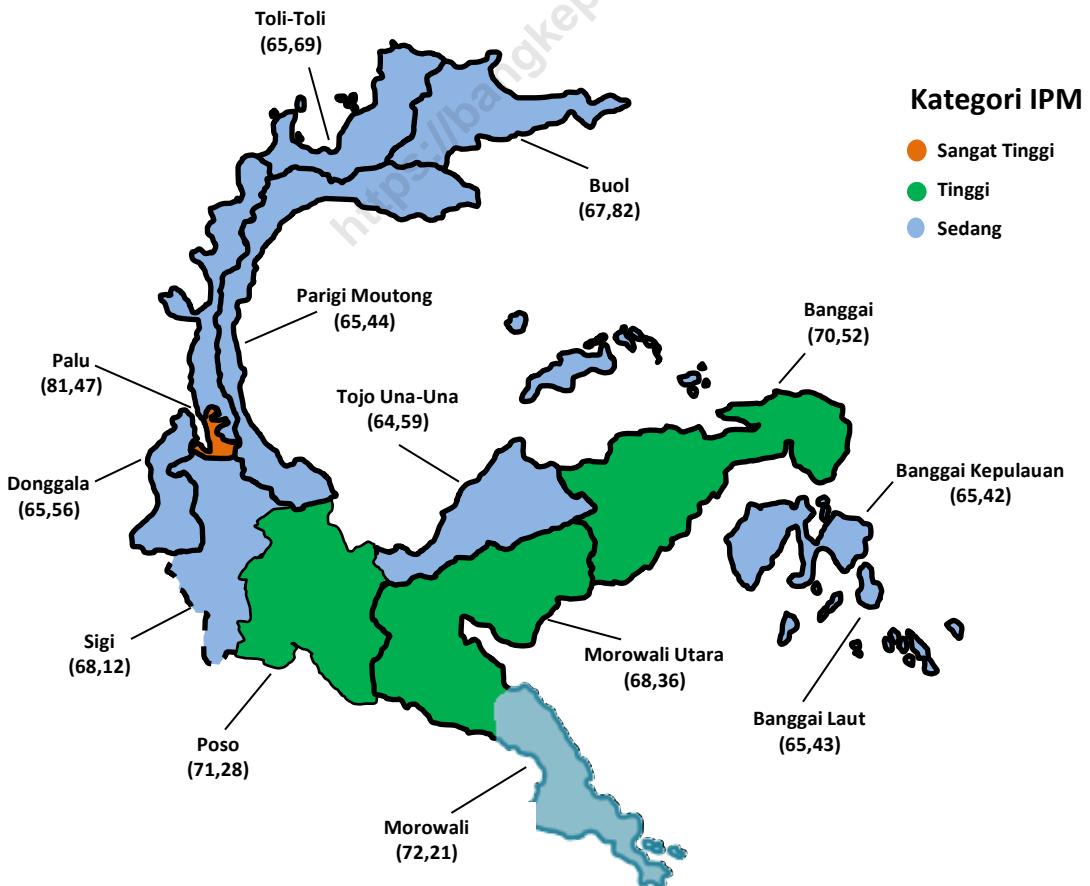
Pada tahun 2020 terdapat kabupaten/kota dengan predikat IPM 'Sangat Tinggi' dari 13 kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Tengah, yaitu Kota Palu dengan nilai IPM sebesar 81,47. Kota Palu merupakan wilayah dengan nilai IPM tertinggi dari tahun ke tahun, mengingat bahwa Kota Palu merupakan Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah di mana segala fasilitas baik kesehatan, pendidikan, maupun segala aktifitas ekonomi dan pemerintahan berpusat di sana. Kelengkapan fasilitas dan kemudahan akses ini tentu saja mendukung pembangunan manusia di sana. Tidak

heran jika Kota Palu ini menjadi wilayah yang memimpin IPM tertinggi di Sulawesi Tengah.

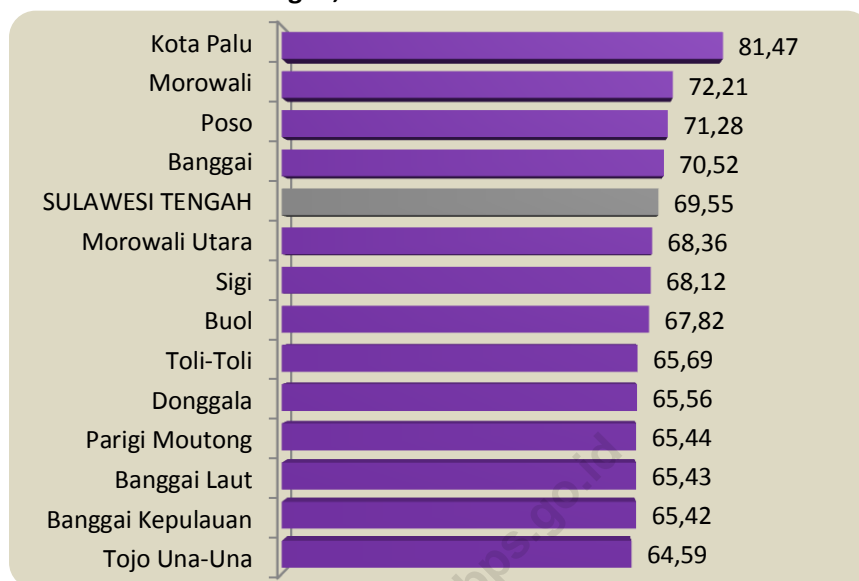
Selanjutnya, perkembangan IPM di Sulawesi Tengah juga tampak pada kabupaten-kabupaten yang berkategori “Tinggi” sebanyak 3 kabupaten pada tahun 202. Kabupaten dengan kategori IPM tinggi yaitu Morowali, Poso dan Banggai. Sementara itu, 9 kabupaten lainnya berkategori ‘Sedang’.

Banggai Kepulauan merupakan salah satu dari 9 kabupaten di Sulawesi Tengah dengan nilai IPM berkategori ‘Sedang’. IPM yang dicapai Banggai Kepulauan tercatat sebesar 65,42 dan masih jauh di bawah IPM Sulawesi Tengah. Dilihat dari posisinya, IPM Banggai Kepulauan berada pada peringkat 12 dari 13 kabupaten/kota di Sulawesi Tengah. Peringkat ini masih sama dengan tahun 2019.

Gambar 2.2. Peta IPM Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah, 2020



Gambar 2.3. Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah, 2020



Pada tahun 2020, terlihat bahwa Kota Palu memiliki nilai IPM tertinggi. Selanjutnya, urutan kabupaten/kota di Sulawesi Tengah berdasarkan nilai IPM setelah Kota Palu yaitu Kabupaten Morowali (72,21), Kabupaten Poso (71,28), Kabupaten Banggai (70,52), Kabupaten Morowali Utara (68,36), Kabupaten Sigi (68,26), Kabupaten Buol (67,82), Kabupaten Toli-Toli (65,69), Kabupaten Donggala (65,56), Kabupaten Parigi Moutong (65,44), Kabupaten Banggai Laut (65,43), Kabupaten Banggai Kepulauan (65,42), dan terakhir Kabupaten Tojo Una-una (64,59).

2.2. Status Pembangunan Manusia Banggai Kepulauan

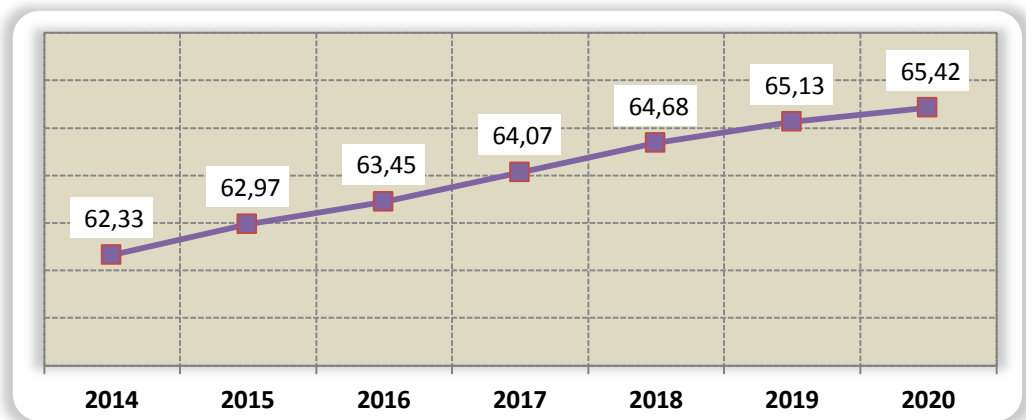
Berdasarkan hasil penghitungan BPS, pembangunan manusia di Banggai Kepulauan tahun 2020 masuk kategori sedang dengan nilai IPM sebesar 65,42. Capaian tersebut terbentuk dari dimensi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.

Gambar 2.4. IPM Banggai Kepulauan dan Komponen Pembentuk, 2020

Angka Harapan Hidup saat Lahir (Tahun)	66,31
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,06
Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	8,43
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Juta Rupiah/Orang/Tahun)	7,43
IPM	65,42

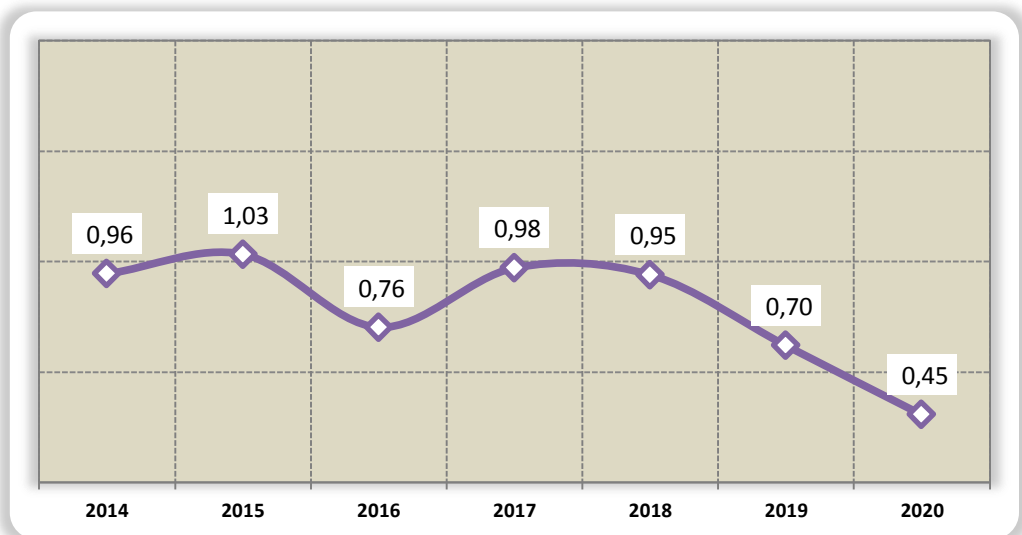
Dimensi umur panjang dan hidup sehat diukur dari Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH). Pada tahun 2020, UHH Banggai Kepulauan mencapai 66,31 tahun. Artinya, bayi yang baru lahir diharapkan dapat bertahan hidup rata-rata mencapai usia 66,31 tahun. Selanjutnya, untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Di Banggai Kepulauan, rata-rata penduduk usia 7 tahun yang mulai bersekolah, diharapkan dapat mengenyam pendidikan hingga 13,06 tahun, setara dengan lulus Diploma I. Sementara itu, penduduk Banggai Kepulauan berusia 25 tahun ke atas sudah menempuh masa sekolah rata-rata selama 8,43 tahun setara dengan SMP kelas VIII. Dimensi ketiga dalam mengukur IPM yaitu standar hidup layak yang diwakili oleh pengeluaran per kapita disesuaikan. Adapun pengeluaran per kapita di Banggai Kepulauan tahun 2020 sebesar 7,43 juta rupiah per tahun.

Gambar 2.5. Indeks Pembangunan Manusia Banggai Kepulauan, 2014-2020



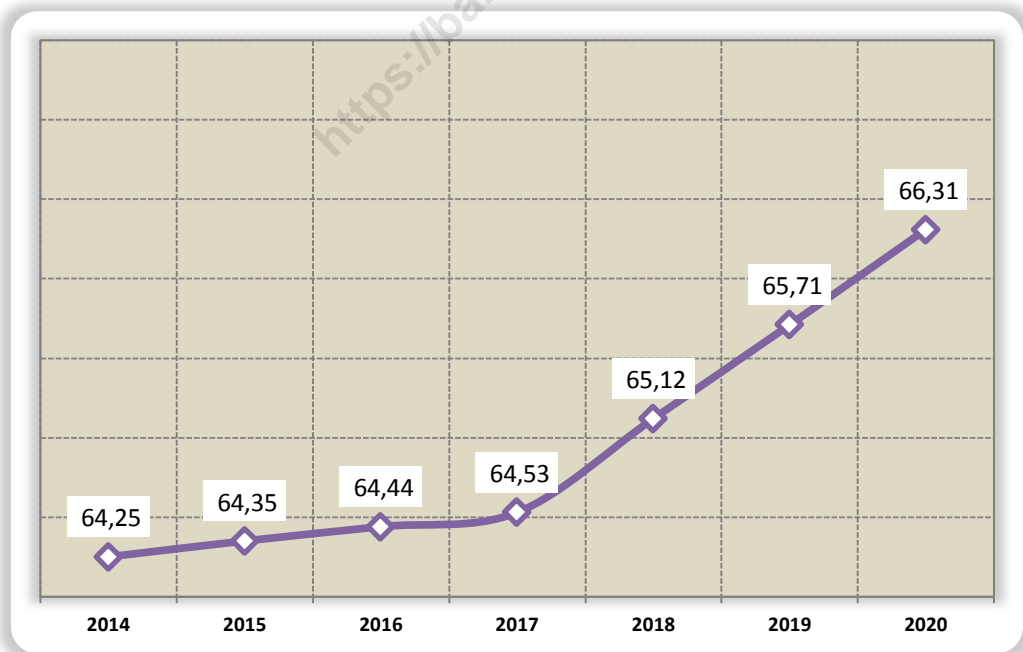
Ditinjau dari perkembangannya, capaian IPM Banggai Kepulauan sebesar 65,42 pada tahun 2020 meningkat 0,29 poin dari tahun 2019 yang sebesar 65,13. Perkembangan ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Banggai Kepulauan secara umum semakin membaik. Dalam kurun waktu 6 (enam) tahun, nilai IPM Banggai Kepulauan meningkat hingga 3,09 poin. Meskipun IPM Banggai Kepulauan terus meningkat dari tahun ke tahun, namun statusnya masih berada pada kategori 'Sedang'.

Gambar 2.6. Pertumbuhan IPM Banggai Kepulauan, 2014-2020 (Persen)



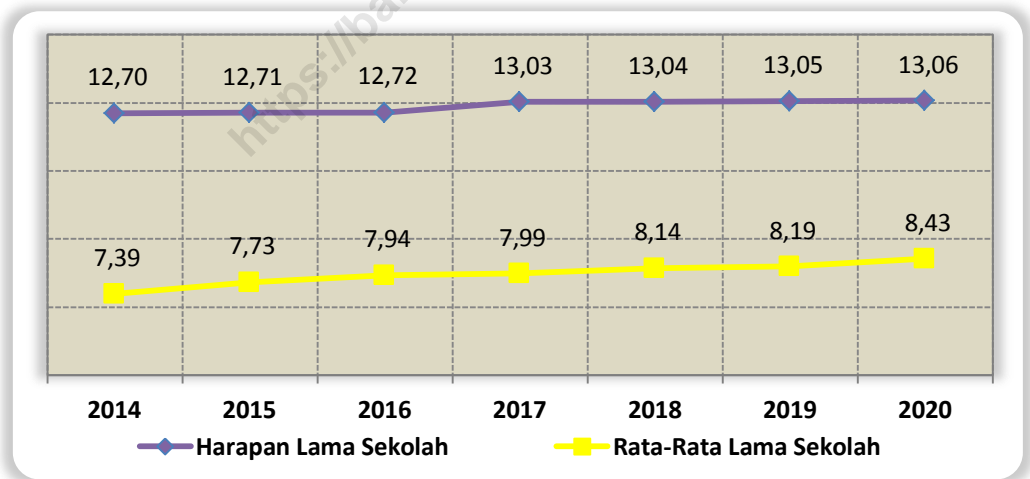
Untuk melihat kecepatan perkembangan IPM selama kurun waktu tertentu dapat dilakukan dengan membandingkan laju pertumbuhan per tahun. Pertumbuhan IPM Kabupaten Banggai Kepulauan selama 2014 sampai dengan 2020 cenderung melambat, mulai dari tahun 2014 yang sebesar 0,96 persen menjadi 1,03 persen pada tahun 2015 dan kembali turun pada tahun 2015 menjadi 0,76 persen. Pada tahun 2017 angka pertumbuhan menunjukkan perkembangan yang baik, yaitu tumbuh sebesar 0,98 persen, namun untuk tahun 2018 kembali melambat dengan angka 0,95 persen hingga tahun 2020 menjadi 0,45 persen. Pertumbuhan IPM yang selalu menunjukkan kecenderungan positif menunjukkan bahwa pembangunan manusia secara umum di Banggai Kepulauan mengalami perbaikan dari tahun ke tahun. Perbaikan ini tentu saja diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Banggai Kepulauan sehingga dapat bersaing dengan sumber daya manusia dari kabupaten/kota lain di Sulawesi Tengah.

Gambar 2.7. Umur Harapan Hidup saat Lahir di Banggai Kepulauan, 2014-2020 (Tahun)



Jika dilihat dari tiga dimensi pembentuk IPM, secara umum Banggai Kepulauan mengalami peningkatan di sebagian besar dimensi. Dimensi pertama yaitu umur panjang dan hidup sehat yang diukur dengan indikator Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH). Indikator ini mencerminkan derajat kesehatan di suatu wilayah, baik dari sisi sarana prasarana, akses, maupun kualitas kesehatan. Pada tahun 2020, UHH Banggai Kepulauan mencapai 66,31 tahun. Artinya, bayi yang baru lahir diharapkan dapat bertahan hidup hingga usia 66,31 tahun. Kecenderungan Umur Harapan Hidup tahun 2014-2020 di Banggai Kepulauan menunjukkan perkembangan positif dari tahun ke tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa bayi yang baru lahir hidup diharapkan dapat hidup lebih lama karena membaiknya derajat kesehatan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kemajuan teknologi di bidang kesehatan, peningkatan fasilitas kesehatan, dan meningkatnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat terhadap gaya hidup yang sehat.

Gambar 2.8. Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah di Banggai Kepulauan, 2014-2020 (Tahun)

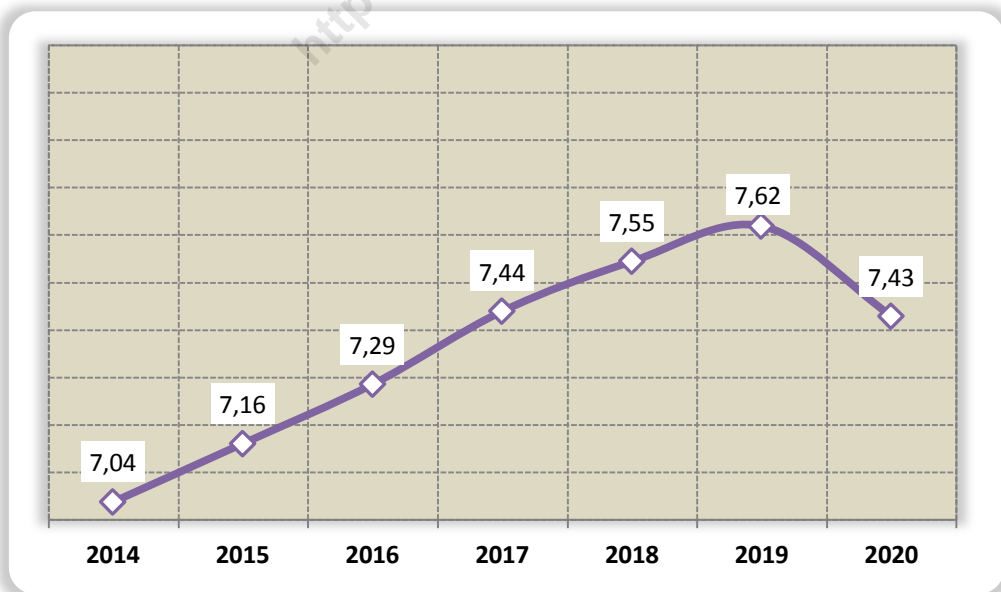


Dimensi kedua pembentuk IPM yaitu pengetahuan yang diukur dengan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Harapan lama sekolah menggambarkan pendidikan yang diharapkan akan ditempuh oleh anak usia 7 tahun yang mulai bersekolah. Sementara itu, rata-rata lama sekolah menggambarkan rata-rata lama pendidikan yang telah ditempuh oleh penduduk

usia 25 tahun ke atas. Secara umum, harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah di Banggai Kepulauan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Dilihat dari besarnya, tercatat angka harapan lama sekolah lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata lama sekolah. Hal ini menjadi wajar, mengingat bahwa dari tahun ke tahun kualitas pendidikan terus ditingkatkan dan diperbaharui, terutama pada kelompok pendidikan dasar. Upaya ini juga meningkatkan partisipasi sekolah penduduk berusia 7 tahun ke atas. Semakin tinggi partisipasi sekolah penduduk usia 7 tahun ke atas, maka harapan lama sekolah akan semakin panjang. Di sisi lain, rata-rata lama sekolah menunjukkan masa pendidikan yang sudah ditempuh oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas. Seperti yang diketahui bahwa keterjangkauan pendidikan pada masa silam tidak semudah saat ini. Hal ini menyebabkan rendahnya partisipasi sekolah pada tahun-tahun tersebut, sehingga rata-rata lama sekolah yang telah ditempuh penduduk usia 25 tahun masih relatif rendah.

Gambar 2.9. Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan di Banggai Kepulauan, 2014-2020 (Juta Rupiah/Tahun)



Selanjutnya, dimensi ketiga yang membentuk IPM adalah standar hidup layak yang dihitung dari pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Yang dimaksud dengan pengeluaran per kapita disesuaikan adalah pengeluaran per kapita dengan tahun dasar 2012 yang sudah disesuaikan antar daerah. Pada tahun 2020, pengeluaran per kapita penduduk di Banggai Kepulauan sekitar 7,43 juta per tahun. Angka pengeluaran per kapita pada tahun 2020 mengalami penurunan sebagai dampak dari adanya pandemi Covid-19.

Dari semua capaian dimensi IPM Banggai Kepulauan, jika dibandingkan dengan capaian provinsi, tampak kelemahan IPM Banggai Kepulauan yang berada pada dimensi kesehatan dan standar hidup layak. Kedua dimensi ini menjadi masalah yang sama dari tahun – tahun sebelumnya. Oleh karena itu, Banggai Kepulauan harus memacu perbaikan pembangunan di bidang kesehatan dan upaya meningkatkan daya beli masyarakat. Langkah ini bukan hal yang sederhana karena harus diikuti pembangunan secara komprehensif. Misalnya untuk pembangunan bidang kesehatan, harus diikuti indikator input yang memadai seperti ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan. Kemudian diikuti perbaikan indikator proses seperti tingkat pemanfaatan fasilitas kesehatan oleh masyarakat khususnya bagi ibu dan anak untuk menekan angka kematian bayi dan angka kematian ibu, disamping indikator lain seperti imunisasi, mengurangi bayi yang berstatus gizi buruk, mengurangi angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular, dan lain-lain.

Di bidang penguatan daya beli masyarakat, perlu diupayakan pembukaan lapangan kerja baru untuk mengurangi pengangguran terbuka, perbaikan tingkat upah pekerja antara lain melalui instrumen Upah Minimum Regional serta upaya lain yang ujungnya membutuhkan masuknya investasi dan kemudahan berusaha di Banggai Kepulauan. Salah satu kuncinya adalah mengangkat tingkat pendapatan penduduk yang berusaha di bidang pertanian dan mendorong industri pengolahan hasil-hasil pertanian, karena sektor ini yang dominan di Banggai Kepulauan.

KESENJANGAN PEMBANGUNAN MANUSIA

<https://bangkepkab.bps.go.id>

3

KESENJANGAN PEMBANGUNAN MANUSIA

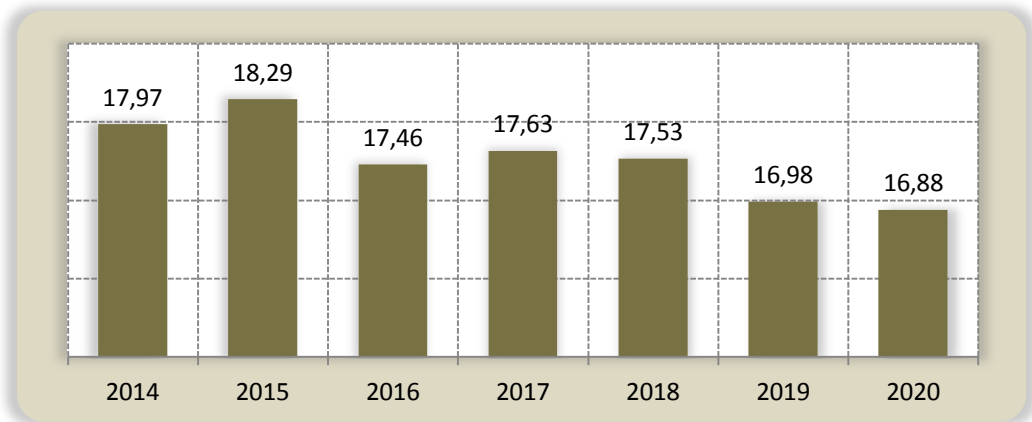
Pada hakikatnya pembangunan nasional harus bersifat adil, demokratis, terbuka, partisipatif dan terintegrasi. Namun, kemajuan pembangunan manusia yang berbeda telah melahirkan kesenjangan pembangunan. Daerah atau kawasan yang relatif lambat perkembangannya mengalami berbagai kesulitan dan membuat daerah atau kawasan tersebut semakin tertinggal dari daerah atau kawasan yang lain. Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab dalam mengatasi kesenjangan pembangunan termasuk di bidang pembangunan manusia, di mana pemerintah lebih berperan untuk melakukan fasilitasi dan koordinasi.

Sebelumnya telah dibahas terkait posisi Banggai Kepulauan dalam Sulawesi Tengah. Oleh karenanya kesenjangan pembangunan manusia antar kabupaten/kota sangat menarik untuk dibahas. Dari sisi regional, tidak terdapat kabupaten/kota di Sulawesi Tengah dengan status pembangunan manusia “rendah”, sebagian besar berstatus “Sedang”. Namun, bukan berarti pembangunan manusia telah merata pada level yang sama, kesenjangan tetap ada. Kesenjangan ini tidak hanya dilihat dari sisi nilai IPM secara utuh, akan tetapi kesenjangan antar dimensi juga harus diperhatikan, mengingat bahwa dimensi-dimensi inilah yang membentuk nilai IPM.

3.1 Kesenjangan Antar Kabupaten/Kota

Konsep pembangunan manusia yang diharapkan semua kalangan yaitu pembangunan yang merata tanpa ada ketimpangan. Konsep IPM yang dibangun berdasarkan beberapa dimensi, maka pembangunan yang merata ini akan terwujud apabila capaian semua dimensi telah merata dan berkeadilan. Namun, perbedaan kecepatan pembangunan manusia setiap wilayah memunculkan kesenjangan pembangunan manusia.

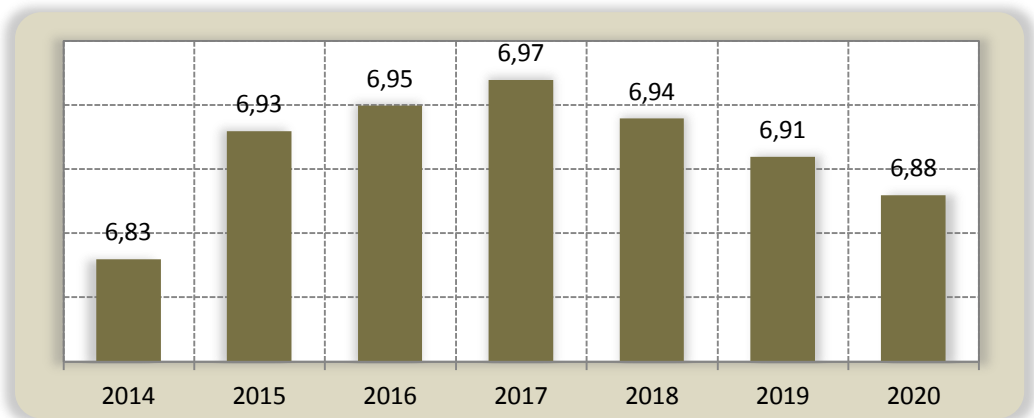
Gambar 3.1. Selisih IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah, 2014-2020



Sampai dengan tahun 2020, kesenjangan pembangunan manusia antar kabupaten/kota terlihat dari capaian Kota Palu sebagai kabupaten/kota dengan IPM tertinggi dengan Kabupaten Tojo Una-una sebagai kabupaten/kota dengan IPM terendah. Selama 2019 hingga 2020, perbedaan IPM kedua daerah ini cenderung menurun yang berarti kesenjangan antara kabupaten/kota cenderung menyempit, meskipun sempat mengalami kenaikan pada tahun 2015 dan 2017. Kembali meningkatnya selisih IPM kedua kabupaten/kota ini disebabkan oleh laju pertumbuhan IPM Kota Palu yang lebih cepat dibandingkan peningkatan IPM Kabupaten Tojo Una-Una.

Meskipun demikian, kesenjangan pembangunan manusia yang terjadi pada tahun 2020 setidaknya masih memberikan peluang untuk menuju arah perbaikan. Pada umumnya, daerah dengan kualitas pembangunan manusia yang berada pada level 'sedang' masih berpeluang untuk meningkat lebih cepat dibanding daerah dengan kualitas pembangunan manusia yang sudah tinggi. Namun, hal tersebut dapat terjadi apabila strategi pembangunan benar-benar diarahkan untuk meningkatkan kualitas penduduk sehingga pada akhirnya akan meningkatkan pembangunan manusia.

Gambar 3.2. Selisih UHH Tertinggi dan Terendah, 2014-2020 (Tahun)



Kesehatan merupakan salah satu bagian penting dari proses kehidupan manusia. Kesehatan masyarakat saat ini semakin membaik. Meskipun tingkat kesehatan masyarakat semakin membaik, akan tetapi kesenjangan tingkat kesehatan antar kabupaten/kota justru membesar. Hal ini terlihat dari kecenderungan selisih Umur Harapan Hidup saat lahir selama 2014-2020 antara daerah dengan angka UHH tertinggi dengan yang terendah yang cenderung meningkat. Meskipun demikian, kesenjangan dalam tiga tahun terakhir cenderung semakin rendah.

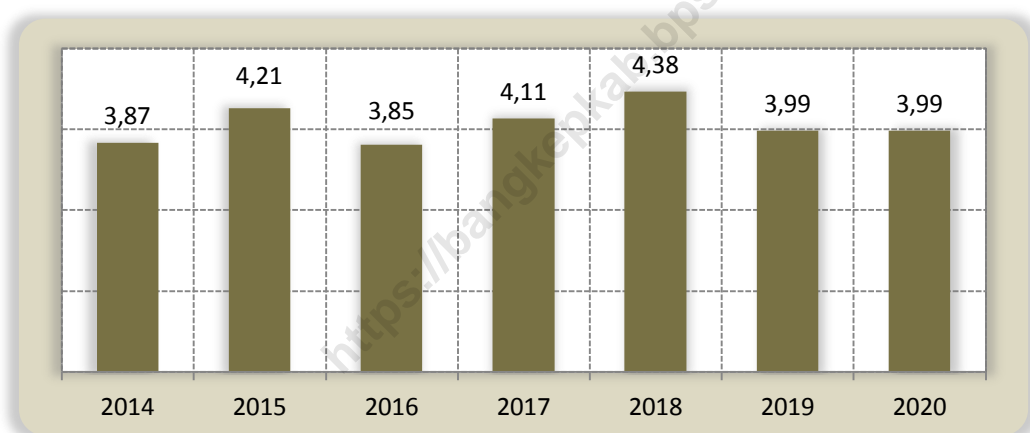
Harapan hidup saat lahir di Kabupaten Poso pada tahun 2020 telah mencapai 71,18 tahun. Kabupaten ini merupakan kabupaten dengan harapan hidup tertinggi di Sulawesi Tengah. Sementara itu, kabupaten dengan harapan hidup saat lahir paling rendah yaitu Kabupaten Parigi Moutong. Kabupaten ini memiliki Umur Harapan Hidup saat lahir sebesar 64,30 tahun.

Perkembangan selisih Umur Harapan Hidup saat lahir menunjukkan tren yang meningkat walau pada tahun 2018 dan 2019 mengalami sedikit penurunan. Hal ini menunjukkan terjadi sedikit penurunan kesenjangan, di mana kabupaten dengan capaian terendah belum mampu tumbuh lebih cepat untuk mengejar ketertinggalannya. Selama kurun waktu 2014-2020, Umur Harapan Hidup saat lahir

Kabupaten Parigi Moutong meningkat 1,13 poin, sedangkan Kabupaten Poso mengalami peningkatan sebesar 1,19 poin pada periode yang sama.

Berbeda dengan kesenjangan Umur Harapan Hidup yang memiliki kecenderungan meningkat, kesenjangan pembangunan manusia pada dimensi pendidikan lebih bergejolak. Seperti yang telah dijelaskan bahwa dimensi pendidikan ini dapat dilihat melalui dua indikator, yaitu Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Angka harapan lama sekolah ini merupakan salah satu indikator input dalam bidang pendidikan. Sedangkan rata-rata lama sekolah merupakan indikator output dari sebuah proses pendidikan.

Gambar 3.3. Selisih HLS Tertinggi dan Terendah, 2014-2020 (Tahun)

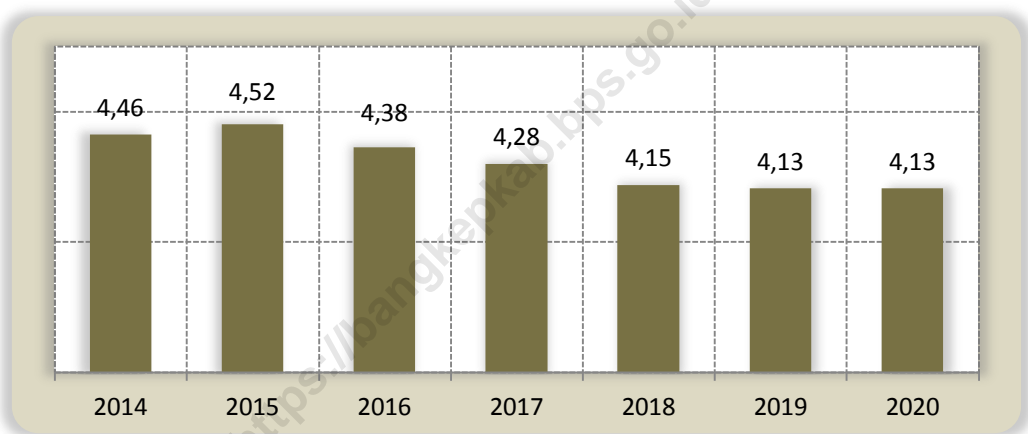


Kesenjangan angka harapan lama sekolah usia tujuh tahun ke atas selama periode 2014-2020 mengalami pola naik turun. Pada periode 2014-2015 cenderung mengalami peningkatan, akan tetapi menurun kembali pada tahun 2016 dan naik kembali pada periode 2017-2018 lalu kembali turun pada tahun 2019 dan tidak mengalami perubahan di tahun 2020. Pada tahun 2014, selisih angka harapan lama sekolah tertinggi dengan yang terendah terjadi antara Kota Palu dengan Kabupaten Tojo Una-Una. Akan tetapi pada tahun 2020 terjadi perubahan, selisih tersebut terjadi antara Kota Palu dengan Kabupaten Morowali Utara.

Kesenjangan harapan lama sekolah yang turun pada tahun 2020 ini didorong oleh perkembangan harapan lama sekolah di Tojo Una-Una. Pada tahun 2020,

Harapan Lama Sekolah Kota Palu sebesar 16,23 tahun yang hanya meningkat 0,01 poin dari tahun 2019. Sementara Kabupaten Tojo Una-Una mempunyai harapan lama sekolah 12,28 tahun mengalami peningkatan 0,03 poin dari tahun 2019. Angka harapan lama sekolah Kabupaten Tojo Una Una ini sudah bukan lagi yang terendah dari kabupaten/kota lain dan telah mencapai lebih dari 12 tahun, walau Kota Palu telah mencapai 16 tahun. Oleh karena itu, peningkatan angka ini masih terus diupayakan untuk memperkecil kesenjangan tersebut demi tercapainya pendidikan yang merata di Sulawesi Tengah.

Gambar 3.4. Selisih RLS Tertinggi dan Terendah, 2014-2020 (Tahun)

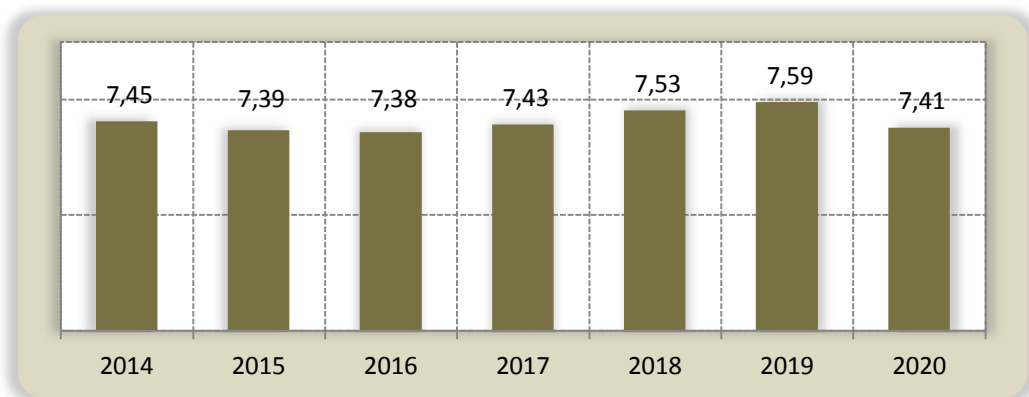


Indikator pendidikan kedua yang tercakup dalam pembangunan manusia adalah rata-rata lama sekolah penduduk berusia 25 tahun ke atas. Selama periode 2014-2020 selisih angka rata-rata lama sekolah kabupaten/kota yang tertinggi dengan yang terendah cenderung menurun dari tahun ke tahun. Berbeda dengan indikator pendidikan sebelumnya, perbaikan kesenjangan rata-rata lama sekolah ini terjadi antara Kota Palu dengan Kabupaten Parigi Moutong. Kabupaten Moutong berhasil meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas dari 7,47 tahun pada tahun 2019 menjadi 7,48 pada tahun 2020, meningkat 0,01 poin, sama halnya dengan peningkatan Kota Palu lebih rendah yaitu 0,01 poin.

Kesenjangan dimensi standar hidup layak yang diwakili oleh pengeluaran per kapita yang disesuaikan dari tahun 2014-2020 terlihat fluktuatif. Pada 2014-

2016 mengalami sedikit mengalami penurunan kemudian naik kembali pada tahun 2017 sampai pada tahun 2019. Kemudian tahun 2020 kembali mengalami penurunan. Selama periode 2014-2020, Kota Palu selalu menjadi kabupaten/kota dengan nilai pengeluaran per kapita tertinggi dibandingkan dengan kabupaten lain. Posisi Kota Palu sebagai Ibukota Provinsi menjadikan kota ini sebagai kota dengan fasilitas yang lebih lengkap dan mudah dijangkau dibandingkan dengan kabupaten lain. Pengeluaran per kapita masyarakat di Kota Palu pada tahun 2014 telah mencapai 14,41 juta rupiah dan meningkat menjadi 15,21 juta rupiah pada tahun 2019. Pada tahun 2020, seluruh kabupaten kota di Sulawesi Tengah mengalami penurunan pengeluaran per kapita sebagai dampak dari adanya pandemi Covid-19 yang melanda di seluruh dunia. Kota Palu tercatat turun menjadi 14,84 juta rupiah pada tahun 2020. Kabupaten/kota dengan nilai pengeluaran per kapita tahun 2020 yang paling rendah yaitu Kabupaten Banggai Kepulauan yang sebesar 7,43 juta rupiah. Besarnya nilai pengeluaran per kapita di Kota Palu bahkan hampir dua kali lipat dari angka Kabupaten Banggai Kepulauan. Hanya Kota Palu dan Kabupaten Morowali yang pengeluaran per kapita per tahun mencapai angka lebih dari 10 juta rupiah selama periode 2014-2020. Selebihnya masih berada di bawah angka tersebut. Perbedaan yang cukup signifikan ini menunjukkan masih besarnya kesenjangan ekonomi di Sulawesi Tengah ini.

Gambar 3.5. Selisih Pengeluaran Tertinggi dan Terendah, 2014-2020 (Juta Rupiah/Tahun)



CATATAN TEKNIS

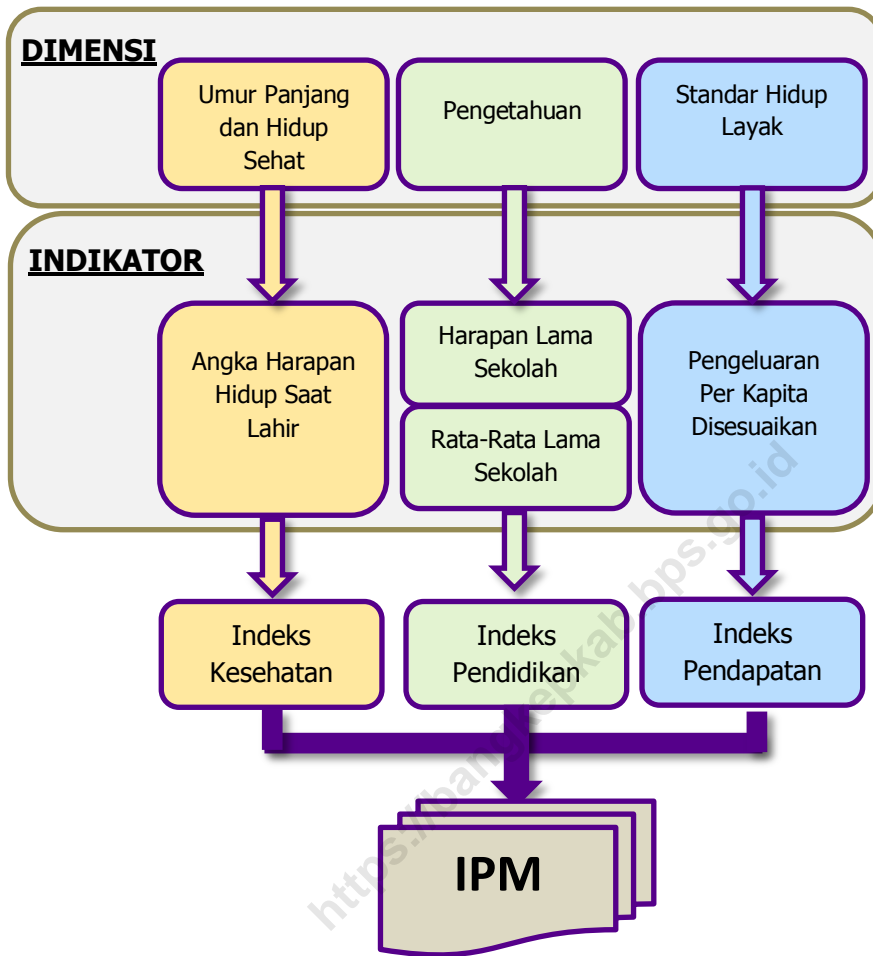
<https://bangkepkab.bps.go.id>

CATATAN TEKNIS

Menurut UNDP, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup yang layak (*decent standard of living*). Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor.

Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan Umur Harapan Hidup saat lahir. Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Selanjutnya, untuk mengukur dimensi pengetahuan yang diukur melalui tingkat pendidikan digunakan gabungan indikator harapan lama sekolah (*expected years of schooling*) dan rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*). Harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa yang akan datang. Sementara itu, rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli (*Purchasing Power Parity*). Kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Secara ringkas, gambaran pembentukan IPM dapat dilihat pada Gambar C.1 di bawah ini:

Gambar C.1. Bagan Pembentukan IPM



Untuk menghitung indeks masing-masing komponen IPM, digunakan batas maksimum dan minimum masing-masing komponen tersebut seperti yang terlihat pada Table L.1 di bawah ini:

Tabel C.1. Nilai Maksimum dan Minimum Dari Setiap Komponen IPM

Komponen IPM	Satuan	Minimum	Maksimum
(1)	(2)	(3)	(4)
Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH)	Tahun	20	85
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	0	18
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	0	15
Pengeluaran per Kapita	Rupiah	1 007 436	26 572 352

❖ **Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat**

Dimensi umur panjang dan hidup sehat ini direpresentasikan melalui indeks kesehatan yang dibangun dari Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) atau dapat juga disebut *Life Expectancy* (e_0). UHH merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. UHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. UHH dihitung dari hasil proyeksi Sensus Penduduk (SP) 2010. Jenis data yang digunakan adalah Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). Penghitungan Umur Harapan Hidup melalui pendekatan tak langsung (indirect estimation) dengan paket program *Micro Computer Program for Demographic Analysis* (MCPDA) atau *Mortpack*.

Indeks kesehatan yang terbentuk dari UHH ini dihitung dengan menghitung nilai maksimum dan nilai minimum harapan hidup sesuai standar UNDP, dimana angka tertinggi sebagai batas atas untuk penghitungan indeks yaitu 85 tahun dan terendah yaitu 20 tahun. Adapun formulasi penghitungan Indeks Kesehatan yaitu:

$$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}} \dots\dots\dots (1)$$

Dimana:

$I_{kesehatan}$: Indeks kesehatan

AHH : Umur Harapan Hidup

AHH_{min} : Nilai minimum harapan hidup, yaitu 20 tahun

AHH_{max} : Nilai maksimum harapan hidup, yaitu 85 tahun

❖ **Dimensi Pengetahuan**

Komponen kedua dari pembentukan IPM yaitu dimensi pengetahuan yang diukur melalui tingkat pendidikan. Dalam hal ini, indikator yang digunakan adalah rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*) dan harapan lama sekolah (*expected years of schooling*).

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) atau disebut juga *Mean Years of Schooling* (MYS) menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk yang berusia 25 tahun ke atas. RLS ini dihitung untuk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi bahwa pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Penghitungan RLS pada usia 25 tahun ke atas juga mengikuti standar internasional yang digunakan oleh UNDP.

Penghitungan indeks rata-rata lama sekolah menggambarkan dua batasan yang dipakai sesuai kesepakatan UNDP. Rata-rata lama sekolah memiliki batas maksimum 15 tahun dan batas minimum 0 tahun. Indeks rata-rata lama sekolah dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}} \dots\dots\dots (2)$$

Dimana:

- I_{RLS} : Indeks rata-rata lama sekolah
- RLS : Rata-rata lama sekolah
- RLS_{min} : Nilai minimum rata-rata lama sekolah, yaitu 0 (nol) tahun
- RLS_{max} : Nilai maksimum rata-rata lama sekolah, yaitu 15 tahun

Harapan Lama Sekolah (HLS) atau disebut juga *Expected Years of Schooling* (EYS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Untuk mengakomodir penduduk yang tidak tercakup dalam Susenas, HLS dikorekai dengan siswa yang bersekolah di pesankecenderungan. Formula penghitungan HLS yaitu:

$$HLS_a^t = \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{p_i^t} \dots\dots\dots (3)$$

$$HLS = FK \times HLS_a^t \quad \dots\dots\dots (4)$$

Dimana:

- HLS : Harapan lama sekolah
- HLS_a^t : Harapan lama sekolah pada umur a di tahun t
- E_i^t : Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t
- P_i^t : Jumlah penduduk usia i yang pada tahun t
- i : Usia ($a, a + 1, \dots, n$)
- FK : Faktor koreksi pesankecenderungan.

Adapun Faktor koreksi dihitung dengan rumus:

$$Rasio\ santri\ mukim = \frac{Jumlah\ santri\ bermukim}{Jumlah\ santri\ seluruhnya} \dots\dots\dots (5)$$

$$Jumlah\ santri\ sekolah\ dan\ bermukim = rasio\ santri\ mukim \times jumlah\ santri\ sekolah \quad (6)$$

$$Faktor\ Koreksi = \frac{Jumlah\ santri\ sekolah\ dan\ bermukim}{Jumlah\ penduduk\ umur\ 7\ tahun\ ke\ atas} + 1 \quad (7)$$

Indikator HLS ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditujukan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Harapan lama sekolah juga menggunakan batasan yang dipakai sesuai dengan kesepakatan UNDP. Batas maksimum untuk harapan lama sekolah yaitu 18 tahun dan batas minimumnya yaitu 0 (nol) tahun. Adapun formulasi indeks harapan lama sekolah yaitu:

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}} \dots\dots\dots (8)$$

Dimana:

- I_{HLS} : Indeks harapan lama sekolah
- HLS : Harapan lama sekolah
- HLS_{min} : Nilai minimum harapan lama sekolah, yaitu 0 (nol) tahun
- HLS_{max} : Nilai maksimum harapan lama sekolah, yaitu 18 tahun.

Pada proses pembentukan IPM, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah diberi bobot yang sama, kemudian penggabungan kedua indikator ini digunakan sebagai indeks pendidikan sebagai salah satu komponen pembentuk IPM. Berikut formulasi indeks pendidikan yang dibentuk dari indeks rata-rata lama sekolah dan indeks harapan lama sekolah:

$$I_{pendidikan} = \frac{I_{RLS} + I_{HLS}}{2} \dots\dots\dots (9)$$

Dimana:

- $I_{pendidikan}$: Indeks pendidikan
- I_{RLS} : Indeks rata-rata lama sekolah
- I_{HLS} : Indeks harapan lama sekolah

❖ **Dimensi Standar Hidup Layak**

Dimensi ketiga dari pembentukan IPM ini yaitu standar hidup layak. Standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita yang disesuaikan, sedangkan BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan paritas daya beli (purchasing power parity). Perhitungan paritas daya beli dilakukan berdasarkan 96 komoditas kebutuhan pokok seperti terlihat dalam Tabe C.2. Dalam penghitungan standar hidup layak digunakan pengeluaran per kapita yang disesuaikan, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$PPP_j = \prod_{i=1}^m \left(\frac{p_{ij}}{p_{ik}} \right)^{1/m} \dots\dots\dots (10)$$

Dimana:

- PPP_j : Paritas daya bei di wilayah j
- p_{ij} : harga komoditas i di Kabupaten/Kota j
- p_{ik} : harga komoditas i di Jakarta Selatan

m : jumlah komoditas

Tabel C.2. Komoditi Kebutuhan Pokok Sebagai Dasar Perhitungan Daya Beli (PPP)

Daging sapi	Mie Instan	Perlengkapan mandi
Daging ayam ras	Roti manis/roti lainnya	Barang kecantikan
Daging ayam kampung	Kue kering	Perawatan kulit, muka, kuku, rambut
Telur ayam ras	Kue basah	Sabun cuci
Susu kental manis	Makanan gorengan	Biaya RS pemerintah
Susu bubuk	Gado-Gado/Ketoprak	Biaya RS swasta
Susu bubuk bayi	Nasi campur/rames	Puskesmas/pustu
Bayam	Nasi goreng	Praktek dokter/poliklinik
Kangkung	Nasi putih	SPP
Kacang panjang	Lontong/ketupat sayur	Bensin
Bawang merah	Soto/gulai/sop/rawon/cincang	Transportasi/pengangkutan umum
Bawang putih	Sate/tongseng	Pos dan telekomunikasi
Cabe merah	Mie bakso/Mie Rebus/Mie goreng	Pakaian jadi laki-laki dewasa
Cabe rawit	Makanan ringan anak	Pakaian jadi perempuan dewasa
Tahu	Ikan (goreng/bakar, dll)	Pakaian jadi anak-anak
Tempe	Ayam/daging (goreng dll)	Alas kaki
Jeruk	Makanan jadi lainnya	Minyak pelumas
Mangga	Air kemasan galon	Meubelair
Salak	Minuman jadi lainnya	Peralatan rumah tangga
Pisang Ambon	Es lainnya	Perlengkapan perabot rumah tangga
Pisang raja	Rokok kretek filter	Alat-alat dapur/makan

Batas minimum perhitungan pengeluaran per kapita yang digunakan dalam penghitungan IPM yaitu Rp1.007.436,00 dan batas maksimumnya yaitu Rp26.572.352,00. Daya beli minimum merupakan garis kemiskinan terendah Kabupaten pada tahun 2010 (data empiris) yaitu di Tolikara, Papua. Sementara itu, daya beli maksimum merupakan nilai tertinggi Kabupaten yang diproyeksikan hingga tahun 2025 (akhir RPJPN) yaitu perkiraan pengeluaran per kapita Jakarta

Selatan tahun 2025. Adapun penghitungan indeks pengeluaran dihitung dengan rumus:

$$I_{pengeluaran} = \frac{\ln(pengeluaran) - \ln(pengeluaran_{min})}{\ln(pengeluaran_{max}) - \ln(pengeluaran_{min})} \dots\dots\dots (11)$$

❖ **Penyusunan IPM**

IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks pengeluaran. Setelah diperoleh nilai indeks masing-masing komponen, maka IPM dapat dihitung dengan rumus:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \dots\dots\dots (12)$$

Dimana:

IPM : Indeks Pembangunan Manusia

I_{kesehatan} : Indeks Kesehatan

I_{pendidikan} : Indeks Pendidikan

I_{pengeluaran} : Indeks Pengeluaran

Nilai indeks hasil hitungan masing-masing komponen tersebut adalah antara 0 (keadaan terburuk) dan 1 (keadaan terbaik). Dalam laporan ini indeks tersebut dinyatakan dalam ratusan (dikalikan 100) untuk mempermudah penafsiran, seperti yang disarankan oleh BPS (BPS-UNDP , 1996).

IPM diklasifikasikan dalam 4 (empat) klasifikasi (Tabel 2.4). Klasifikasi tersebut digunakan untuk melihat capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu. Dengan demikian, dapat dilakukan pengelompokan wilayah-wilayah yang sama dalam hal capaian pembangunan manusia.

Tabel C.3. Klasifikasi IPM

Klasifikasi	Capaian IPM
(1)	(2)
Sangat Tinggi	$IPM \geq 80$
Tinggi	$70 \leq IPM < 80$
Sedang	$60 \leq IPM < 70$
Rendah	$IPM < 60$

❖ Pertumbuhan IPM

Pertumbuhan IPM ini digunakan untuk mengukur kecepatan pembangunan IPM dalam kurun waktu satu tahun. Dengan demikian akan diketahui perubahan capaian terkini dengan capaian tahun sebelumnya. Adapun rumus yang digunakan yaitu:

$$\text{Pertumbuhan IPM} = \frac{IPM_t - IPM_{t-1}}{IPM_{t-1}} \times 100\%$$

Dimana:

IPM_t : IPM di suatu wilayah pada waktu t

IPM_{t-1} : IPM di suatu wilayah pada waktu $t - 1$

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://bangkepkab.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

Kompleks Perkantoran, Jl. Bukit Trikora, Kec. Tinangkung, 94785
Telp. (0462) 2223881

Homepage: <https://bangkepkab.bps.go.id> Email: bps7201@bps.go.id

ISBN 978-602-0715-31-5 (PDF)

